

Kompleksitas Penyelenggaraan Akreditasi Berbasis Online pada Lembaga PAUD

Siti Mutingah¹, Novan Ardy Wiyani²
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
DOI : <https://doi.org/10.15642/jeced.v4i2.1971>

Abstract

Online-based PAUD accreditation is not without problems. There are various problems that show the complexity of the implementation of online-based PAUD accreditation at PAUD institutions in Banyumas district. This study aims to describe and analyze the complexity that occurs in the implementation of online-based accreditation at PAUD institutions in Banyumas district. This study uses a quantitative method that is descriptive in nature where the researcher can describe the results of the research that has been carried out by describing the object of research at the current state based on the actual facts then analyzed and interpreted. Based on the results of the research, the findings were in the form of obstacles or problems faced in implementing online PAUD accreditation including: (1) lack of guidance related to the eight National PAUD Education Standards; (2) lack of assistance in filling in the EDS-PA on the Sispna application; (3) teachers' limited ICT skills; and (4) limited internet network in PAUD institutions.

Abstrak

Akreditasi PAUD berbasis *online* dilaksanakan bukan tanpa masalah. Terdapat berbagai permasalahan yang menunjukkan sisi kompleksitas pada penyelenggaraan akreditasi PAUD berbasis online pada lembaga PAUD di kabupaten Banyumas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kompleksitas atau kerumitan yang terjadi pada penyelenggaraan akreditasi berbasis online di lembaga PAUD kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat deskriptif dimana peneliti dapat menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh temuan berupa kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan akreditasi PAUD secara *online* diantaranya: (1) kurangnya pembinaan terkait dengan delapan Standar Pendidikan Nasional PAUD; (2) kurangnya pendampingan dalam pengisian EDS-PA pada aplikasi Sispna; (3) keterbatasan kemampuan TIK pada guru; dan (4) keterbatasan jaringan internet di lembaga PAUD.

Article Info

Article history:

Received: June 29, 2022
Approved: December 12, 2022
Published online: December 31, 2022

Keywords:

accreditation
PAUD institution
problems
online



Informasi Artikel

Riwayat Artikel

Diterima: 29 Juni 2022
Disetujui: 12 Desember 2022
Publikasi online: 31 Desember 2022

Kata kunci:

akreditasi
lembaga PAUD
masalah
online



PENDAHULUAN

Layanan pendidikan diselenggarakan berdasarkan standar mutu tertentu. Hal itu dilakukan agar terselenggara layanan pendidikan yang bermutu (Love & Horn, 2021). Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan *output* atau lulusan yang bermutu. Ia akan menjadi sumber daya manusia yang bermutu, yang siap andil dalam mensukseskan pembangunan negaranya (Fedyk et al., 2021). Untuk memastikan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan *basic* mutu, maka dilakukanlah akreditasi lembaga pendidikan (Bendixen & Jacobsen, 2020).

Akreditasi pada dasarnya merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk melakukan penjaminan mutu dan pengendalian mutu pendidikan melalui kegiatan penilaian dan pengukuran berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan untuk menguji kelayakan program pada suatu lembaga pendidikan (Handayani, 2016). Akreditasi sebagai penjaminan mutu dan pengendalian mutu pendidikan dilakukan di semua jenjang pendidikan, termasuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Akreditasi pada jenjang PAUD merupakan suatu upaya pemerintah yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu lembaga PAUD untuk memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan PAUD yang sudah ditetapkan. Dengan akreditasi PAUD suatu lembaga PAUD dapat dinilai kelayakannya dalam menyelenggarakan layanan PAUD berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditentukan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF (Busron & Rachmi, 2020).

Dari sisi kebijakan, akreditasi yang dilaksanakan oleh setiap lembaga PAUD diselenggarakan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 087/U/2012 yang menyebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan maka pemerintah Indonesia menetapkan tidak hanya sekolah negeri saja yang harus melakukan akreditasi namun pada sekolah swasta juga diberlakukan peraturan yang sama. Dengan harapan dihasilkan kualitas pendidikan yang sama antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Jika melihat fakta di lapangan, sebagian besar lembaga PAUD merupakan lembaga pendidikan swasta yang sudah barang tentu harus diakreditasi.

Pelaksanaan akreditasi PAUD sebelum tahun 2017 menggunakan mekanisme manual yaitu menggunakan borang dimana semua administrasi yang mencakup delapan standar yang akan diajukan sebagai syarat akreditasi dibuat dengan tumpukan kertas (*paperless*). Namun mulai tahun 2017 dilakukan pengembangan sistem oleh Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF yaitu integrasi permohonan dari *offline* mekanisme manual menjadi *online* melalui aplikasi Sispena dengan harapan akan dapat mempermudah satuan pendidikan PAUD dan semua pihak dalam proses pendaftaran akreditasi.

Pada pelaksanaan akreditasi PAUD, lembaga PAUD yang mengajukan akreditasi disebut asesi. Saat melakukan pendaftaran secara *online* melalui aplikasi Sispena, asesi wajib mengisi Evaluasi Diri Prasyarat Akreditasi yang biasa disingkat EDS-PA. Pada tahapan pengisian EDS-PA ini asesi mengisi butir instrumen penilaian yang mengacu pada delapan Standar Nasional Pendidikan PAUD. Pengisian berfokus pada kelengkapan dan kebenaran dokumen (*compliance*) yang diunggah asesi dan sudah terintegrasi dengan Dapodik. Setelah pengisian EDS-PA memenuhi persyaratan minimal 80% akan dinilai pada tahap penilaian Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA). Dari hasil penilaian KPA akan dilakukan penilaian tahapan visitasi dimana pada tahapan ini asesor visitasi datang secara langsung ke lembaga PAUD yang akan diakreditasi untuk menilai menggunakan instrumen yang berfokus pada kinerja (*performance*) dan implementasi dari delapan

Standar Nasional Pendidikan PAUD. Kemudian nilai dari tahap visitasi akan dilanjutkan pada tahap validasi yang akan menghasilkan peringkat akreditasi Satuan Pendidikan dengan peringkat A (Amat baik), B (Baik), C (Cukup) atau TT (Tidak terakreditasi), (Daryati & Supratman, 2021).

Namun ada yang berbeda dalam proses pelaksanaan akreditasi yang dilakukan BAN PAUD dan PNF pada tahun 2021 ini, yaitu karena adanya pandemi covid-19 maka pelaksanaan pada tahap akreditasi yang pada tahun sebelumnya dilakukan secara *offline* yaitu asesor visitasi datang secara langsung ke lembaga PAUD yang akreditasi, pada akreditasi tahun 2021 ini tahap visitasi dilakukan secara *online* yaitu melalui aplikasi *zoom meeting*.

Pada pelaksanaan tahap akreditasi secara *online* melalui aplikasi *zoom meeting* ternyata banyak menimbulkan kendala dan permasalahan yang dialami baik bagi asesor maupun asesi yang dalam hal ini pendidik dan tenaga kependidikan dari lembaga PAUD yang diakreditasi (Nuhayati et al., 2022). Dari hasil kajian pendahuluan yang telah dilakukan oleh penulis pada lembaga PAUD di wilayah kabupaten Banyumas dapat diketahui bahwa kendala dan permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan akreditasi secara *online* diantaranya: (1) kurangnya pemahaman pendidik dan tenaga kependidikan mengenai delapan Standar Pendidikan Nasional PAUD yang diperlukan dalam memenuhi dokumen dalam instrumen akreditasi; (2) kendala jaringan internet karena lokasi lembaga PAUD yang diakreditasi tidak semuanya berada dalam jaringan internet yang kuat terutama untuk yang lokasinya di lingkungan pedesaan atau pegunungan; (3) lemahnya kemampuan dan penguasaan pada guru PAUD terhadap pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi dokumentasi *performance* yang dibutuhkan dalam proses penilaian dalam tahapan akreditasi.

Permasalahan di atas tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Perlu dirumuskan alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan terkait dengan pelaksanaan akreditasi berbasis *online*. Alternatif solusi tersebut bisa dirumuskan dengan baik ketika diketahui penyebab masalah dalam pelaksanaan akreditasi berbasis *online*. Pada dasarnya masalah dan penyebab masalah tersebut merupakan suatu kompleksitas atau kerumitan yang terdapat dalam penyelenggaraan kegiatan akreditasi berbasis *online* di lembaga PAUD.

Secara Bahasa kompleksitas bisa diartikan sebagai kerumitan-kerumitan yang melingkupi suatu hal. Kerumitan-kerumitan tersebut muncul sebagai implikasi dari keberadaan suatu masalah (Alwi, 2002). Pada penelitian ini akan disajikan mengenai kompleksitas atau kerumitan yang terjadi pada penyelenggaraan akreditasi berbasis *online* di lembaga PAUD kabupaten Banyumas.

Dengan demikian tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kompleksitas atau kerumitan yang terjadi pada penyelenggaraan akreditasi berbasis *online* di lembaga PAUD kabupaten Banyumas. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para *stakeholders* PAUD untuk mengantisipasi berbagai masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan akreditasi berbasis *online*.

Ada beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis. Pertama, penelitian Siti Nor Asiah yang berjudul “Analisis Manajemen PAUD Berbasis Standar Akreditasi PAUD dan PNF di Kutai Kartanegara”. Penelitiannya ditujukan untuk mendeskripsikan manajemen PAUD yang berbasis pada Standar Badan Akreditasi Nasional di Kutai Kartanegara (Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan, Standar Isi dan Standar Proses) (Asiah, 2018). Sisi persamaan penelitian Siti Nor Asiah dengan penelitian penulis adalah sama-sama menjadikan akreditasi PAUD sebagai kajian

penelitian. Sedangkan sisi perbedaannya adalah jika penelitian Siti Nor Asiah mengkaitkan akreditasi PAUD dengan manajemen PAUD sementara penelitian penulis mengkaji tentang akreditasi PAUD secara *online* dari sisi kompleksitas permasalahannya.

Kedua, penelitian Busron yang berjudul “Analisis Capaian Standar dan Pemanfaatan Hasil Akreditasi PAUD Provinsi Banten”. Penelitiannya ditujukan untuk melihat (1) bagaimana analisis capaian standar hasil akreditasi pada kabupaten/kota di Provinsi Banten dan (2) bagaimana pemerintah daerah dapat memanfaatkan hasil akreditasi dalam menentukan program dan kebijakan pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Banten (Busron & Rachmi, 2020). Penelitian Busron dengan penulis sama-sama mengkaji tentang akreditasi PAUD. Perbedaannya adalah penelitian Busron mengkaji tentang pencapaian terhadap standar akreditasi, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang kompleksitas dalam penyelenggaraan akreditasi berbasis *online*.

Ketiga, penelitian Eliza Febriani dan Jhoni Warmansyah yang berjudul “Akreditasi Satuan PAUD Berbasis Sistem Penilaian Akreditasi (SISPENA)”. Penelitiannya ditujukan untuk mengkaji bahan-bahan literatur dari sumber-sumber kepustakaan tentang akreditasi pada Satuan PAUD (Febriani & Warmansyah, 2021). Penelitian mereka dengan penelitian penulis sama-sama mengkaji tentang akreditasi PAUD. Sedangkan perbedaannya penelitian mereka merupakan penelitian kepustakaan sementara penelitian penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Galunic & Weeks, 2017). Pada penelitian ini terdapat 10 lembaga PAUD di kabupaten Banyumas yang terakreditasi di pertengahan tahun 2022 sebagai populasi penelitian. Kesepuluh lembaga PAUD tersebut antara lain: (1) TK Diponegoro 147 Panembangan; (2) TK Pertiwi Gunungwetan; (3) TK Diponegoro 9 Notog; (4) TK Pertiwi Purwojati; (5) Pos PAUD Pelita Azahra Kalitapen; (6) RA Diponegoro 203 Gunungwetan; (7) TK Diponegoro 216 Karanganyar; (8) TK Diponegoro 125 Arcawinangun; (9) TK Diponegoro 45 Bobosan; dan (10) TK Diponegoro 12 Purwokerto.

Dari 10 lembaga PAUD diambil 7 lembaga PAUD sebagai sampelnya dengan menggunakan teknik *probability sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel dengan memberikan peluang yang sama pada setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Kemudian dilakukan dengan *random sampling* kombinasi *cluster sampling* sehingga terambil 7 lembaga PAUD dari populasi (Sugiyono, 2010). Ketujuh lembaga PAUD tersebut antara lain: (1) TK Pertiwi Purwojati; (2) Pos PAUD Pelita Azahra Kalitapen; (3) RA Diponegoro 203 Gunungwetan; (4) TK Diponegoro 216 Karanganyar; (5) TK Diponegoro 125 Arcawinangun; (6) TK Diponegoro 45 Bobosan; dan (7) TK Diponegoro 12 Purwokerto.

Data pada penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik angket, wawancara dan studi dokumentasi. Angket digunakan untuk mendapatkan data terkait dengan kompleksitas yang dihadapi dalam penyelenggaraan akreditasi berbasis *online* pada lembaga PAUD di kabupaten Banyumas provinsi Jawa Tengah. Wawancara digunakan sebagai teknik untuk menggali lebih dalam terkait dengan kompleksitas yang dihadapi dalam penyelenggaraan akreditasi berbasis *online* pada lembaga PAUD di kabupaten Banyumas berdasarkan hasil angket. Sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi pada

lembaga PAUD yang diteliti. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan rumus persentase sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N}$$

Keterangan:

P : Persentase

F : Frekuensi

N : *Number of Case* (Ernawati, 2017)

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu jenjang pendidikan diharapkan memiliki standar minimal pelayanan yang sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Dalam menentukan kelayakan suatu lembaga PAUD untuk diakses masyarakat maka lembaga PAUD harus diakreditasi melalui kegiatan akreditasi yang diselenggarakan oleh BAN PAUD dan PNF (Pendidikan Nonformal). Bentuk lembaga PAUD yang diakreditasi oleh BAN PAUD dan PNF meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2021 dapat diketahui bahwa perangkat akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal terdiri dari delapan standar yaitu: (1) standar tingkat pencapaian perkembangan anak; (2) standar isi; (3) standar proses; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian. Berdasarkan kebijakan dan mekanisme akreditasi PAUD dan PNF tahun 2019 dapat diketahui bahwa tahapan pelaksanaan akreditasi meliputi:

1. Tahap Evaluasi Diri Satuan-Prasyarat Akreditasi (EDS-PA), dimana pada tahap ini kelengkapan dan kebenaran dari dokumen (*compliance*) yang dimiliki oleh lembaga dan beberapa indikator terintegrasi dengan dapodik maupun data emis diunggah di aplikasi Sispena dan dilakukan secara *online*.
2. Tahap penilaian Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), dimana pada tahap ini dokumen yang telah diunggah dalam Sispena dinilai secara *online* guna mendapatkan skor untuk memenuhi persyaratan maju ke tahap berikutnya yaitu tahap visitasi.
3. Tahap Visitasi, yang dilakukan oleh asesor visitasi menggunakan instrumen untuk menilai kinerja (*performance*) dan pengimplementasian dari dokumen delapan standar PAUD yang telah diunggah dalam Sispena.
4. Tahap Validasi, yang merupakan tahap merumuskan hasil visitasi yang telah dilakukan untuk menentukan peringkat akreditasi yang meliputi kelayakan program secara keseluruhan yang dilaksanakan dengan peringkat atau kriteria Amat Baik (A), Baik (B), Cukup (C) dan Tidak Terakreditasi (TT).

Pada tahap visitasi dapat diketahui kemampuan lembaga PAUD dalam menyelenggarakan layanan PAUD sesuai dengan delapan standar atau kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada sampel lembaga PAUD yang diteliti dapat diketahui sisi kompleksitas dalam pelaksanaan akreditasi secara *online* pada lembaga PAUD di kabupaten Banyumas sebagai berikut:

1. Kendala dalam pelaksanaan akreditasi secara *online*

Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan akreditasi secara *online* dapat diketahui berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel 1. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan Akreditasi secara *online*

No	Kendala dan Permasalahan	Prosentase
1	Kurangnya pembinaan terkait 8 SNP	3 (42,9%)
2	Kurangnya pendampingan EDS-PA aplikasi Sispena	2 (28,6%)
3	Terbatasnya kemampuan TIK pada pendidik dan tendik	4 (57,1%)
4	Terbatasnya jaringan internet di lembaga PAUD	5 (71,4%)

Berdasarkan tabel 1 di atas diperoleh data bahwa (1) 42,9% lembaga PAUD mengungkapkan bahwa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan akreditasi secara *online* berasal dari kurangnya pemahaman terkait 8 SNP; (2) 28% lembaga PAUD menyatakan bahwa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan akreditasi secara *online* berasal dari kurangnya pendampingan EDS-PA aplikasi Sispena; (3) 57% lembaga PAUD mengungkapkan bahwa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan akreditasi secara *online* berasal dari terbatasnya kemampuan TIK pada pendidik dan tendik ; dan (4) 71% lembaga PAUD menyebutkan bahwa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan akreditasi secara *online* berasal dari terbatasnya jaringan internet di lembaga PAUD.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa permasalahan dalam penyelenggaraan akreditasi berbasis *online* lebih banyak terkait dengan hal kepemilikan peralatan TIK yang *accessible* dengan jaringan internet dan keterbatasan kemampuan TIK pada guru. Padahal dalam era revolusi industri 4.0 sekarang ini para guru dituntut untuk mampu memanfaatkan kecanggihan peralatan TIK dalam penyelenggaraan layanan pendidikan. Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam memanfaatkan peralatan TIK akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian delapan standar nasional pendidikan (Yuliana & Raharjo, 2019).

2. Pembinaan 8 SNP dan Pendampingan EDS-PA Sispena

Tahap demi tahap yang dilakukan dalam akreditasi semua melalui aplikasi Sispena yang berbasis *online*, sehingga dari sinilah sangat dibutuhkan pembinaan terhadap pemahaman delapan Standar Nasional PAUD dan pembinaan terhadap pemenuhan dokumentasi butir instrumen akreditasi EDS-PA pada aplikasi Sispena. Berdasarkan tabel di bawah ini dapat diketahui peran *stakeholders* PAUD dalam pembinaan 8 SNP dan pendampingan EDS-PA di Sispena kepada guru PAUD:

Tabel 2. Pembinaan 8 SNP dan pendampingan EDS-PA di Sispena

No	Unsur	Pembinaan 8 SNP	Pendampingan EDS-PA di Sispena
1	Pengawas/penilik PAUD	1 (14,3%)	1 (14,3%)
2	Yayasan	-	-
3	Asesor PAUD	6 (85,7%)	5 (71,4%)
4	Kepala Sekolah	-	1 (14,3%)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa: (1) 14,3% lembaga PAUD mengungkapkan jika pengawas/penilik ikut berperan dalam pembinaan 8 SNP dan pendampingan EDS-PA di Sispena; (2) 85,7% lembaga PAUD mengungkapkan bahwa pembinaan 8 SNP dan pendampingan EDS-PA di Sispena dilakukan oleh asesor.

Dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa pembinaan dan pendampingan terkait dengan pelaksanaan akreditasi PAUD secara *online* lebih banyak dilakukan oleh asesor

PAUD. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa asesor memiliki peran sebagai duta akreditasi. Namun tentu hal itu tidak boleh membuat pengawas/penilik PAUD sebagai wakil dari dinas pendidikan menyerahkan sepenuhnya pembinaan dan pendampingan tersebut kepada asesor PAUD. Pengawas/penilik PAUD bisa melakukan pembinaan dan pendampingan persiapan akreditasi melalui berbagai kegiatan diskusi baik di setiap lembaga PAUD maupun di setiap berlangsungnya kegiatan HIMPAUDI, IGTKI, dan IGRA. Bahkan jika diperlukan pengawas bisa bekerjasama dengan asesor PAUD dalam menyelenggarakan simulasi kegiatan akreditasi PAUD secara *online*. Agar kegiatan simulasi bisa dilakukan dengan optimal nantinya pengawas/penilik PAUD bisa bekerjasama dengan asesor PAUD untuk mengadakan program pendampingan pelaksanaan akreditasi PAUD secara intensif. Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa program tersebut dapat membantu lembaga pendidikan, termasuk lembaga PAUD untuk melakukan persiapan lebih dini dalam menghadapi proses akreditasi (Bender, 2021).

3. Penggunaan Media Digital di Lembaga PAUD

Pelaksanaan akreditasi berbasis *online* di lembaga PAUD didukung oleh pemanfaatan media digital dalam penyelenggaraan layanan PAUD seperti google drive, e-mail, facebook, Instagram dan youtube. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui data terkait dengan penggunaan media digital dalam penyelenggaraan layanan PAUD khususnya terkait dengan penyimpanan dokumen akreditasi sebagai berikut:

Tabel 3. Penggunaan media digital di lembaga PAUD

No	Media yang digunakan	Jumlah (prosentase)
1	Google drive	5 (71,4%)
2	E-mail	5 (71,4%)
3	Facebook	4 (57,1%)
4	Instagram	2 (28,6%)
5	Youtube	3 (42,9%)

Berdasarkan tabel 3 di atas diperoleh data bahwa semua lembaga PAUD sudah menggunakan media digital dalam mengelola dan menyimpan data-data terkait dengan administrasi serta dokumentasi dalam akreditasi lembaga PAUD. Sebanyak 71,4% lembaga PAUD menyimpan dokumen akreditasi di google drive. Sebanyak 71,4% lembaga PAUD menyimpan dokumen akreditasi di e-mail. Sebanyak 57,1% menyimpan dokumen akreditasi di facebook. Sebanyak 28,6% menyimpan dokumen akreditasi di Instagram. Sebanyak 42,9% lembaga PAUD menyimpan dokumen akreditasi di youtube.

Berdasarkan hasil dokumentasi penelitian dapat diketahui bahwa penyimpanan file berupa word dan pdf lebih banyak dilakukan di google drive. Sedangkan penyimpanan file berupa foto dan video lebih banyak dilakukan di facebook milik lembaga PAUD. Salah satu manfaat yang didapat dari menyimpan dokumen pada google drive dan facebook adalah dapat diaktualisasikannya prinsip paperless dalam penyelenggaraan akreditasi yang dilakukan secara *online* (Medaille et al., 2019).

4. Fasilitasi dalam Meningkatkan Kemampuan Mengoperasikan TIK

Pelaksanaan akreditasi PAUD berbasis *online* lebih banyak dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan peralatan TIK. Ini berarti lembaga PAUD akan mampu merespons pelaksanaan akreditasi berbasis *online* ini Ketika pada guru PAUD memiliki kemampuan dalam memanfaatkan TIK ketika menyelenggarakan layanan PAUD. Namun sayang tidak semua guru PAUD memiliki kemampuan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa faktor penyebab guru belum mampu mengoperasikan

TIK adalah karena mereka tidak memiliki laptop ataupun *personal computer*. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan upaya fasilitasi bagi guru PAUD dalam rangka meningkatkan kemampuan mengoperasikan TIK.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui data terkait dengan fasilitasi dalam meningkatkan kemampuan mengoperasikan TIK sebagai berikut:

Tabel 4. Fasilitasi dalam meningkatkan kemampuan TIK

No	Intensitas Fasilitasi	Belajar Mandiri	Dinas Pendidikan/ Kemenag	Yayasan
1	Sangat Sering	3 (42,9%)	-	-
2	Sering	3 (42,9%)	2 (28,6%)	2 (28,6%)
3	Jarang	-	4 (57,1%)	2 (28,6%)
4	Tidak Pernah	1 (14,3%)	1 (14,3%)	3 (42,9%)

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat diperoleh data yang variatif terkait dengan hasil fasilitasi dalam meningkatkan kemampuan mengoperasikan TIK bagi guru PAUD. Data menunjukkan bahwa: (1) guru sangat sering (42,9%) dan sering (42,9%) meningkatkan kemampuan mengoperasikan TIK dengan belajar mandiri; dan (2) 14,3% guru menyatakan tidak pernah meningkatkan kemampuan mengoperasikan TIK dengan belajar mandiri; (3) sebanyak 28,6% guru PAUD menyatakan sering mengikuti, 57,1% jarang mengikuti dan 14,3% tidak pernah mengikuti pelatihan TIK yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan kabupaten Banyumas dan Kanwil Kemenag kabupaten Banyumas; (4) sebanyak 28,6% guru PAUD menyatakan sering mengikuti, 28,6% jarang mengikut, dan 42,9% tidak pernah mengikuti pelatihan TIK yang diselenggarakan oleh Yayasan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa salah satu hal yang menjadikan guru memiliki kemampuan dalam mengoperasikan TIK untuk kepentingan pendidikan adalah karena pada masa pandemic yang lalu mereka didesak untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan media TIK. Hal itu menjadikan mereka mau tidak mau belajar mengoperasionalkan peralatan TIK secara mandiri. Kemampuan guru dalam mengoperasionalkan peralatan TIK untuk kepentingan penyelenggaraan layanan pendidikan merupakan kemampuan yang *futuristic* (van der Spoel et al., 2020).

5. Ketersediaan Jaringan Internet

Sistem penilaian akreditasi secara *online* selain menuntut pendidik dan tenaga kependidikan untuk menguasai TIK juga membutuhkan sistem jaringan internet yang memadai. Fasilitasi dan ketersediaan jaringan internet yang memadai perlu didukung dengan adanya alokasi dana untuk pembelian paket internet dan pembayaran langganan internet (*wifi*) yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga. Alokasi dana ini dapat diambil dari dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD yang tercantum dalam Permendikbud Ristek Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, BOS dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. Kemudian pada dasarnya pembelian fasilitas ICT yang terkoneksi dengan internet bukan hanya ditujukan untuk penyelenggaraan akreditasi secara *online*, tetapi juga untuk menyelenggarakan pembelajaran digital sehingga anak usia dini mendapatkan penguatan terkait dengan kemampuan literasi digitalnya (Lindriany et al., 2022). Kompetensi literasi digital sangat penting untuk dikuasai oleh anak usia dini di era revolusi industri 4.0 sekarang ini (Otterborn et al., 2019). Kecanggihan peralatan ICT yang terkoneksi

dengan jaringan internet juga bisa dimanfaatkan oleh lembaga PAUD untuk mempraktikkan model digital marketing, di mana dengan praktik model digital marketing tersebut akan dihasilkan proses promosi dan sosialisasi lembaga PAUD yang efektif dan efisien (Zahay et al., 2019).

Hasil penelitian yang dilakukan di lembaga PAUD Kabupaten Banyumas menghasilkan beberapa data perolehan tentang keterbatasan jaringan internet di lembaga PAUD sebagai berikut:

Tabel 5. Keterbatasan Jaringan internet di lembaga PAUD

No	Jaringan Internet Tidak Stabil	Prosentase
1	Sangat Sering	1 (14,3%)
2	Sering	4 (57,1%)
3	Jarang	-
4	Tidak Pernah	2 (28,6%)

Dari data tabel 5 di atas dapat diketahui data tentang keterbatasan jaringan internet di lembaga PAUD pada kabupaten Banyumas sebagai berikut: (1) sebanyak 14,3% lembaga PAUD menyatakan sangat sering mengalami jaringan internet yang tidak stabil pada kegiatan pra visitasi, saat visitasi dan pasca visitasi; (2) sebanyak 57,1% lembaga PAUD menyatakan sering mengalami jaringan internet yang tidak stabil pada kegiatan pra visitasi, saat visitasi dan pasca visitasi; (3) sebanyak 28,6% lembaga PAUD menyatakan tidak pernah mengalami jaringan internet yang tidak stabil pada kegiatan pra visitasi, saat visitasi dan pasca visitasi.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pada dasarnya jaringan internet yang tidak stabil disebabkan karena letak geografis lembaga PAUD yang kurang *accessible* untuk mendapatkan sinyal. Hal itu terjadi pada lembaga-lembaga PAUD yang ada di pedesaan. Akses untuk memasang *wifi* di pedesaan juga masih terbatas, hal itu semakin menyulitkan pihak lembaga PAUD untuk mendapatkan jaringan internet yang stabil.

6. Solusi Mengatasi Keterbatasan Jaringan Internet pada Lembaga PAUD

Keterbatasan jaringan internet dalam penyelenggaraan akreditasi PAUD berbasis *online* menjadi salah satu masalah yang tidak boleh dianggap sepele, terlebih lagi kelancaran pelaksanaan visitasi virtual akan sangat dipengaruhi stabil atau kuatnya jaringan internet. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui data terkait dengan solusi dalam mengatasi keterbatasan jaringan internet pada lembaga PAUD di kabupaten Banyumas sebagai berikut:

Tabel 6. Solusi mengatasi keterbatasan jaringan internet pada lembaga PAUD

No	Solusi mengatasi Jaringan Internet Tidak Stabil	Prosentase
1	Memasang <i>Wifi</i>	4 (57,1%)
2	Mencari sinyal ke tempat lain/warnet	2 (28,6 %)
3	Tidak melakukan tindakan solusi	1 (14,3%)

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat diketahui data sebagai berikut: (1) sebanyak 57,1% lembaga PAUD mengatasi keterbatasan jaringan internet dengan cara memasang *wifi*; (2) sebanyak 28,6% lembaga PAUD mengatasi keterbatasan jaringan internet dengan cara mencari sinyal ke tempat lain atau ke warnet; dan (3) sebanyak 14,3% lembaga PAUD tidak melakukan Tindakan solusi terhadap keterbatasan jaringan internet.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru PAUD dapat diketahui bahwa mereka lebih cenderung memasang *wifi* untuk mengatasi masalah jaringan internet yang tidak stabil karena dengan memasang *wifi* mereka bisa tetap bekerja di lembaga PAUD-nya. Namun jika sinyal masih saja stabil maka pihak lembaga PAUD akan memasang *wifi* pada salah satu rumah guru yang secara geografis bisa menangkap sinyal jaringan internet dengan baik.

7. Tanggapan terhadap Kemanfaatan Pelaksanaan Akreditasi PAUD secara *Online*

Meskipun pelaksanaan akreditasi PAUD berbasis *online* menuai beberapa masalah, namun guru-guru pada lembaga PAUD yang telah diakreditasi mengungkapkan bahwa ada sisi kemanfaatan yang didapat dari dilakukannya akreditasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui data sebagai berikut:

Tabel 7. Tingkat kemanfaatan pelaksanaan Akreditasi PAUD secara *online*

No	Tingkat Kemanfaatan	Prosentase
1	Sangat Bermanfaat	4 (57,1%)
2	Bermanfaat	3 (42,9%)
3	Kurang Bermanfaat	-
4	Tidak Bermanfaat	-

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat diperoleh data bahwa: (1) sebanyak 57,1% lembaga PAUD menyatakan bahwa akreditasi berbasis *online* sangatlah bermanfaat bagi mereka; dan (2) sebanyak 42,9% lembaga PAUD menyatakan bahwa akreditasi berbasis *online* bermanfaat bagi mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru PAUD dapat diketahui bahwa penyelenggaraan akreditasi secara *online* memberikan beberapa kemanfaatan, diantaranya: (1) keberadaan SNP sebagai kriteria yang harus dipenuhi dalam akreditasi membuat penyelenggaraan layanan PAUD menjadi lebih terarah; (2) akreditasi sebagai upaya penjaminan mutu suatu lembaga dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan layanan PAUD; (3) akreditasi secara *online* menjadikan para guru termotivasi untuk meningkatkan kompetensi digitalnya; (4) akreditasi secara *online* dilakukan secara *paperless* dan virtual sehingga bisa menghemat anggaran akreditasi lembaga PAUD; (5) akreditasi PAUD secara *online* menyadarkan *stakeholders* pada lembaga PAUD yang akan diakreditasi tentang urgensi teknologi digital dalam penyelenggaraan layanan PAUD.

SIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat membuat semua bidang dioperasikan dengan memanfaatkan kecanggihan peralatan TIK. Hal itu berlaku pula di bidang pendidikan. Pendidikan sebagai suatu proses pemberian layanan jasa kepada masyarakat bisa diselenggarakan dengan memanfaatkan kecanggihan peralatan TIK. Upaya tersebut telah dilakukan pada berbagai bidang pendidikan, termasuk pada bidang penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan melalui kegiatan akreditasi kini dilakukan secara *online*. Hal itu terjadi pula di lembaga-lembaga PAUD. Akreditasi secara *online* pada lembaga-lembaga PAUD pada pelaksanaannya menuai banyak permasalahan sehingga memunculkan suatu kompleksitas dalam penyelenggaraan akreditasi secara *online*. Dua masalah utama yang dihadapi yaitu keterbatasan kemampuan literasi digital pada guru serta keterbatasan pada akses jaringan internet. Meski demikian di balik keberadaan dua masalah tersebut terdapat berbagai

kemanfaatan yang didapat sebagai implikasi dari diselenggarakannya kegiatan akreditasi berbasis *online*, yaitu: (1) guru PAUD memiliki arah yang jelas dalam penyelenggaraan dan pengembangan lembaga PAUD; (2) guru PAUD terdorong untuk menguatkan kompetensi literasi digitalnya; dan (3) guru PAUD mendapatkan deskripsi tentang tingkat keberhasilannya dalam menyelenggarakan layanan PAUD.

ACKNOWLEDGMENT

Penelitian ini didukung oleh UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto serta lembaga-lembaga PAUD sebagai berikut: (1) TK Pertiwi Purwojati; (2) Pos PAUD Pelita Azahra Kalitapen; (3) RA Diponegoro 203 Gunung Wetan; (4) TK Diponegoro 216 Karanganyar; (5) TK Diponegoro 125 Arcawinangun; (6) TK Diponegoro 45 Bobosan; dan (7) TK Diponegoro 12 Purwokerto kabupaten Banyumas provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR RUJUKAN

- Alwi, H., et. al. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Asiah, S. N. (2018). Analisis Manajemen PAUD Berbasis Standar Akreditasi PAUD dan PNF di Kutai Kartanegara. *SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)*, 6(1). <https://doi.org/10.21093/sy.v6i1.1325>
- Bender, D. (2021). Internship assessment in professional program accreditation: A 10-year study. *Education + Training*, 63(2), 256–270. <https://doi.org/10.1108/ET-11-2019-0251>
- Bendixen, C., & Jacobsen, J. C. (2020). Accreditation of higher education in Denmark and European Union: From system to substance? *Quality in Higher Education*, 26(1), 66–79. <https://doi.org/10.1080/13538322.2020.1729310>
- Busron, B., & Rachmi, T. (2020). Analisis Capaian Standar dan Pemanfaatan Hasil Akreditasi PAUD Provinsi Banten. *Ceria: Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(2), 1. <https://doi.org/10.31000/ceria.v11i2.2335>
- Daryati, M. E., & Supratman, J. W. (2021). *BIMBINGAN TEKNOLOGI INSTRUMEN PENILAIAN PRASYARAT AKREDITASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI*. 2, 12.
- Ernawati, I. (2017). UJI KELAYAKAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF PADA MATA PELAJARAN ADMINISTRASI SERVER. *Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education)*, 2(2), 204–210. <https://doi.org/10.21831/elinvo.v2i2.17315>
- Febriani, E., & Warmansyah, J. (2021). Akreditasi Satuan PAUD Berbasis Sistem Penilaian Akreditasi (SISPENA). *JOSTECH: Journal of Science and Technology*, 1(2), 124–135. <https://doi.org/10.15548/jostech.v1i2.3053>
- Fedyk, W., Sołtyś, M., Oleśniewicz, P., Borzyszkowski, J., & Weinland, J. (2021). Human resources management as a factor determining the organizational effectiveness of DMOs: A case study of RTOs in Poland. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 33(3), 828–850. <https://doi.org/10.1108/IJCHM-07-2020-0702>
- Galunic, D. C., & Weeks, J. R. (2017). Intraorganizational Ecology. In J. A. C. Baum (Ed.), *The Blackwell Companion to Organizations* (pp. 75–97). Blackwell Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1002/9781405164061.ch3>
- Handayani, M. (2016). PENCAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN BERDASARKAN HASIL AKREDITASI SMA DI PROVINSI DKI JAKARTA. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1(2), 179–201. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v1i2.766>

- Lindriany, J., Hidayati, D., & Muhammad Nasaruddin, D. (2022). Urgensi Literasi Digital Bagi Anak Usia Dini Dan Orang Tua. *Journal of Education and Teaching (JET)*, 4(1), 35–49. <https://doi.org/10.51454/jet.v4i1.201>
- Love, H. R., & Horn, E. (2021). Definition, Context, Quality: Current Issues in Research Examining High-Quality Inclusive Education. *Topics in Early Childhood Special Education*, 40(4), 204–216. <https://doi.org/10.1177/0271121419846342>
- Medaille, A., Goldrup, S., & Abernathy, T. (2019). Assessing Rigor in Teacher Education: Do NCTQ's Guidelines Measure Up? *The Teacher Educator*, 54(1), 72–89. <https://doi.org/10.1080/08878730.2018.1516260>
- Nuhayati, H., Rusdiyani, I., & Fadlullah. (2022). Implementasi Akreditasi Online Lembaga PAUD dalam Penjaminan Mutu Lembaga PAUD di Kabupaten Serang. *JTPPm (Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran): Edutech and Intructional Research*, 9(2), 1–13.
- Otterborn, A., Schönborn, K., & Hultén, M. (2019). Surveying preschool teachers' use of digital tablets: General and technology education related findings. *International Journal of Technology and Design Education*, 29(4), 717–737. <https://doi.org/10.1007/s10798-018-9469-9>
- Sugiyono, S. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- van der Spoel, I., Noroozi, O., Schuurink, E., & van Ginkel, S. (2020). Teachers' online teaching expectations and experiences during the Covid19-pandemic in the Netherlands. *European Journal of Teacher Education*, 43(4), 623–638. <https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1821185>
- Yuliana, L., & Raharjo, S. B. (2019). KETERCAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH ATAS. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 4(2), 197–212. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v4i2.1457>
- Zahay, D., Altounian, D., Pollitte, W., & James, J. (2019). EFFECTIVE RESOURCE DEPLOYMENT IN DIGITAL MARKETING EDUCATION. *Marketing Education Review*, 29(3), 182–192. <https://doi.org/10.1080/10528008.2018.1555000>

AUTHOR



Siti Mutingah, S.Pd.AUD, (penulis pertama) dilahirkan di Banyumas, 26 Maret 1980, ia menempuh pendidikan S-1 Universitas Terbuka pada Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), sedang menempuh pendidikan S-2 di Prodi Manajemen Pendidikan Islam (MMPI) Pascasarjana UIN Saizu Purwokerto. Sejak tahun 2014, ia menjadi Tutor Prodi PGPAUD FKIP Universitas Terbuka UPBJJ-UT Purwokerto dan terlibat dalam kegiatan keagamaan di masyarakat. Selain menjadi Kepala TK Diponegoro 187 Gerduren juga menjadi Ketua Ketua Ikatan Guru TK Kec. Purwojati, Ketua Kelompok Kerja Kepala TK Kabupaten Banyumas, Ketua Tim Kurikulum PAUD Muslimat NU Banyumas dan Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Jawa Tengah e-mail: quinnvanda22@gmail.com

Dr. Novan Ardy Wiyani, M.Pd.I, (penulis korespondensi) lahir di Brebes, 25 Mei 1985, menempuh pendidikan S-1 di STAIN Purwokerto, S-2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan S-3 di UIN Bandung. Ia menjadi Dosen UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulis telah mempublikasikan buku ajar, buku referensi dan buku monograf sebanyak 39 buku. Selain itu



penulis juga telah banyak menulis di berbagai jurnal nasional. Saat ini citasi penulis sebanyak 8.632 dengan Indeks H 33 dan Indeks i10 sebanyak 64. Profil penulis dapat diakses pada <https://scholar.google.com/citations?user=IYsxegIAAAAJ&hl=id> dengan alamat email: fenomenajiwa@gmail.com